

## **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating**

**Berlian Ritha Belo, Meinarni Asnawi, Anthonius H. Citra Wijaya**  
[meinarni.asnawi@gmail.com](mailto:meinarni.asnawi@gmail.com) [anthoniuscitra@gmail.com](mailto:anthoniuscitra@gmail.com)

*Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih*

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the factors that influence the Quality of Regional Property Management in the Waropen District Government. These factors include the variable Quality of Regional Apparatus, Regulatory Compliance and Management Information Systems. In addition, this study uses moderating variables, namely Leadership Commitment.*

*The analytical tool in this study used WarpPLS 6.0. This software can analyze SEM models based on variants or better known as Partial Least Square. The SEM analysis model with WarpPLS can identify and estimate the relationship between latent variables whether the relationship is linear or non linear*

*The results of this study indicate that Apparatus Quality and Regulatory Compliance affect the Management of BMD with P-values of each variable 0.028 and 0.005. While the management information system has no effect with a P-value of 0.148. In addition, the leadership commitment is not able to moderate the quality of regional apparatus to the quality of BMD management with a p-value of 0.070. While organizational commitment is able to moderate the variable compliance with regulations and management information systems on the quality of BMD management with the respective P-value values of 0.001 and 0.012.*

**Keyword :** *Quality Management of BMD, Quality of Regional Apparatus, Regulatory Compliance, Management Information Systems and Leadership Commitments.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Menurut Gutomo (2014), permasalahan yang menghambat belum diperolehnya opini WTP dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah cukup beragam, namun fenomena yang terjadi lebih sering disebabkan masalah dari pengelolaan aset tetap yang tidak akuntabel sehingga penyajian aset tetap di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya oleh *auditor*. Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dari siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Yusuf (2010: 38), salah satu penyebab tidak bagusnya pengelolaan aset daerah adalah karena saat penganggaran salah dalam menentukan jumlah belanja modal. Berdasarkan PSAP No. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 5, dijelaskan bahwa biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap untuk digunakan. Biaya yang dikeluarkan diluar harga beli, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan pengembangan *software*, dan lain-lain. Komponen-komponen

tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal dan bukan sebagai belanja operasional. Sehingga jika biaya-biaya tersebut dianggarkan sebagai belanja operasional maka harus dilakukan konversi harga, agar didapatkan harga perolehan aset tetap yang wajar (Yusuf, 2010: 38). Selain penganggaran belanja modal, permasalahan pengelolaan barang milik daerah juga terkait masalah penganggaran belanja pemeliharaan aset tetap. Menurut Yusuf (2010: 35), Setiap aset tetap

daerah yang dibeli perlu diimbangi dengan pemeliharaan aset agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 pasal 7 dinyatakan bahwa dalam menyusun anggaran belanja pemeliharaan untuk tahun berjalan, seharusnya mengacu pada kondisi aset tetap pada tahun sebelumnya. Pemerintah daerah harus mengetahui kondisi barang milik daerah (rusak berat, rusak ringan atau baik) yang akan dipelihara sehingga dapat dengan jelas mengetahui berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan untuk memelihara aset tetap agar dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan.

Menurut Abdullah (2009), proses pemeliharaan aset tetap harus didukung dengan pencatatan pemeliharaan aset dalam upaya agar tidak terjadi fenomena *ghost expenditures* yaitu alokasi untuk pemeliharaan selalu dianggarkan secara *incremental* meskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam penghapusan dan pemindahtanganan aset-aset pemerintah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan, masih terdapat penghapusan dan pemindahtanganan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan yang ada dan dapat menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan merugikan daerah ([www.palu.bpk.go.id](http://www.palu.bpk.go.id)). Selain itu kendala lain dari proses penghapusan aset daerah adalah prosedur penghapusan yang dipandang rumit oleh pemerintah daerah karena banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan suatu barang milik daerah dan membutuhkan waktu yang lama ([www.setdaprovkaltim.info](http://www.setdaprovkaltim.info)).

Menurut Sugito (2014), penyebab lain yang menyebabkan terkendalanya pengelolaan barang milik daerah yang baik adalah saldo per jenis aset tetap di neraca SKPD (dan konsolidasiannya) tidak didukung dengan rincian per jenis aset tetap per SKPD. Pengakuan aset tetap oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-OPD dan/atau bidang akuntansi di Bendahara Umum Daerah (BUD) atas transaksi belanja barang, belanja modal, belanja lainnya, atau dari hibah tidak sama dengan pencatatan yang dilakukan oleh pengurus barang di OPD. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan pencatatan aset tetap di buku inventaris dengan neraca keuangan di OPD sebenarnya memerlukan rekonsiliasi secara berkala antara PPK-OPD dengan pengurus/penyimpan barang dan antara bagian akuntansi di Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan bidang administrasi barang milik daerah.

Menurut Gutomo (2014), permasalahan aset tetap pemerintah daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah tidak dicatat, barang milik daerah yang tidak ada justru masih dicatat, barang milik daerah dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Hal ini terjadi dikarenakan aset tetap daerah jumlahnya terlalu banyak dalam kuantitas, juga diakibatkan data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya. Selain itu juga, kelemahan dari segi aset tetap ini juga muncul karena pada masa lalu pemerintahan daerah memposisikan pengelolaan barang milik daerah tidak lebih penting dari pengelolaan keuangan dan menumpukan seluruh permasalahan pengelolaan barang kepada pengurus barang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan artikel pada [www.kepriprov.go.id](http://www.kepriprov.go.id), permasalahan lain dari pengelolaan aset tetap di pemerintah daerah adalah masalah pengelolaan aset yang berasal dari hibah barang milik negara (HBN) asal kegiatan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Permasalahan ini, menurut Respationo (2014) disebabkan penyelesaian aset daerah yang bersumber dari kegiatan dekonsentrasi dan tugas perbantuan tidak segera ditindaklanjuti karena penyerahan aset dari pemerintah pusat kepada daerah

terhambat dari segi administrasinya. Masalah administrasi ini menyebabkan keberadaan aset negara tersebut sulit terlacak keberadaannya. Padahal, jika pemerintah daerah dapat segera menguasai aset tersebut, maka pemerintah dapat segera menguasai dan memelihara aset tersebut. Sesuai dengan permendagri Nomor 71 Tahun 2013 pada pasal 36 dinyatakan bahwa barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik Negara, dan bisa dihibahkan kepada pemerintah daerah.

Sistem teknologi informasi manajemen dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan regulasi pengelolaan barang milik daerah. Sistem teknologi informasi manajemen akan memudahkan penatausahaan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Hasil penelitian Azhar (2013), bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset. Konsekuensinya pada pengurus barang selaku pelaksana teknis pengelola barang dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah harus mampu dan mahir dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA–BMD sekaligus memahami prosedur penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016.

Komitmen pimpinan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Komitmen pimpinan digunakan sebagai variabel *moderating* karena dalam prakteknya, pimpinan OPD sering menomorkan masalah pengelolaan aset daerah (Simamora, 2012). Menurut Kumorotomo (2012), salah satu isu kebijakan terkait pengelolaan aset adalah Kepala SKPD lebih berperan sebagai pengguna anggaran dan sering sekali lupa bahwa mereka juga diamanatkan sebagai pengguna/kuasa pengguna barang yang bertanggungjawab atas pengelolaan barang di SKPD. Menurut Yusuf (2014: 47), disamping kompetensi sumber daya yang memadai untuk mengelola barang milik daerah, diperlukan juga komitmen pimpinan yang terus mendorong pengurus barang bekerja sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan.

Penerapan sistem teknologi informasi memerlukan komitmen pimpinan agar menyediakan peralatan dari *hardware*, *software* dan jaringan yang memadai untuk kelancaran proses penatausahaan barang milik daerah. Komitmen dari pimpinan diperlukan juga dalam pelaksanaan regulasi. Menurut Gusman (2012), sebegitu apapun suatu peraturan disusun, tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan peraturan tersebut maka peraturan tersebut tidak akan berhasil. Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan komitmen pimpinan. Sejalan dengan pendapat Sugito (2014) bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah kurang memiliki komitmen dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dapat terlihat bahwa ada perbedaan data antara Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang dilaporkan oleh pengurus barang kepada pengelola aset dengan data dari bagian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik dalam pengelolaan *asset* di OPD, yaitu antara pengurus barang, penyimpan barang dan seksi akuntansi di bagian keuangan, karena laporan aset yang dibuat oleh ketiga petugas tersebut berbeda–beda, masing–masing petugas membuat laporan sesuai dengan data yang diterimanya dan tidak ada pengecekan satu sama lain. Sebaliknya, jika kepala OPD mau berkomitmen dalam pengelolaan barang milik daerah, seharusnya bisa mengkordinasikan pengurus/pemegang barang dan seksi akuntansi agar berkomunikasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan laporan dengan cara rekonsiliasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih lanjut faktor–faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada OPD Kabupaten Waropen dengan komitmen pimpinan sebagai variabel *moderating*. Adapun yang dipandang menjadi faktor–faktor yang mempengaruhi adalah kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen, dan komunikasi yang diduga mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Waropen.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, dan sistem informasi manajemen, berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah?
2. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan antara kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, dan sistem informasi manajemen dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, sistem informasi manajemen terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah
2. Untuk menganalisis komitmen pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara kualitas aparatur daerah, kepatuhan pada regulasi, dan sistem informasi manajemen dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kualitas Pengelolaan menurut Gaspersz (2001; 4) didefinisikan sebagai satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 menjelaskan yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Mardiasmo (2004: 238), prinsip dasar dari keberhasilan proses pengelolaan barang milik daerah meliputi tiga hal utama yaitu (1) perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan (3) pengawasan (*monitoring*). Kualitas pengelolaan barang milik daerah adalah satu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan barang milik daerah dari suatu entitas.

Pengukuran aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan yaitu sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah membagi aset tetap atas enam golongan yaitu: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) aset tetap lainnya, (6) konstruksi dalam pengerjaan.

Suatu prosedur tentang pengelolaan aset tetap daerah harus dapat mendukung tertibnya mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang merupakan suatu siklus yang saling terkait. Menurut Yusuf (2010: 181), prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pengelolaan barang milik daerah adalah semua tahap sejak tahap perencanaan sampai pada tahap penghapusan harus memiliki dokumentasi yang baik.

Aset tetap daerah adalah salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Yusuf (2010: 13), aset tetap harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. Agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010: 157) hendaknya berpegang teguh pada azas-azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

### **Kualitas Aparatur Daerah**

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan sumber daya manusia atau di dalam pemerintahan disebut aparatur daerah yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai. Menurut Suharto (2012), kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah professional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan. Kualitas aparatur daerah menurut Koswara (2001: 266) merupakan kemampuan professional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya yang cukup, tetapi juga kualitas para pegawai yang harus diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status kepegawaian.

Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016, aparatur yang bertanggung jawab terhadap pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, dan dalam pelaksanaannya Kepala Daerah dibantu oleh: Sekretaris Daerah selaku pengelola; Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; Kepala SKPD selaku pengguna; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna, dan proses teknis dilakukan oleh Penyimpan barang milik daerah; dan Pengurus barang milik daerah.

Penyimpan barang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 pasal 1 poin 8 adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang. Pengurus barang menurut Permendagri 19 Tahun 2016 pasal 1 poin 9 adalah pegawai yang ditugaskan untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna. Pengurus/penyimpan barang diangkat oleh pengelola untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya. Syarat untuk diangkat menjadi penyimpan dan pengurus barang pada SKPD/unit kerja berdasarkan lampiran yang terdapat pada Permendagri 19 Tahun 2016 adalah:

- a. Diusulkan oleh Kepala SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
- b. Paling rendah menduduki golongan II dan paling tinggi golongan III, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- c. Minimal mempunyai pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut secara aktif dalam kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan dan/atau bimbingan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Mempunyai sifat dan moral yang baik, antara lain jujur, teliti, dan dapat dipercaya.

### **Kepatuhan Pada Regulasi**

Setiap organisasi terutama pada sektor pemerintahan dalam melaksanakan setiap kegiatan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dikelola secara tertib dengan memperhatikan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, dan asas efisiensi. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada peraturan yang mengatur tata kelola barang milik daerah berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang berhubungan dengan siklus pengelolaan BMD.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan barang milik daerah antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006 dan perubahannya pertama pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dan perubahan kedua pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Perspektif pertama dalam memahami keberhasilan suatu implementasi adalah kepatuhan para implementor dalam melaksanakan regulasi yang tertuang dalam dokumen regulasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 69). Kepatuhan pada regulasi dalam pengelolaan barang milik daerah merupakan pelaksanaan dari azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Agar implementasi suatu kebijakan pengelolaan barang milik daerah berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, serta mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Inayah, 2010).

### **Sistem Informasi Manajemen Daerah**

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan suatu sistem informasi untuk mencapai pengelolaan Barang Milik Daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki. Sistem Informasi Manajemen menurut Sutanta (2003: 19) merupakan sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna. Sistem informasi manajemen

daerah merupakan penerapan sistem informasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengambil keputusan di semua eselon atau jajaran pemerintah daerah (Anwar dan Oetojo, 2004: 112).

Menurut Sutanta (2003 : 20) komponen fisik penyusun sistem informasi manajemen adalah :

1. Perangkat keras (*hardware*), meliputi piranti-piranti yang digunakan oleh sistem komputer untuk masukan dan keluaran (*input/output device*), *memory*, modem, pengolah (*processor*) dan *peripheral* lain.
2. Perangkat lunak (*software*), yaitu program-program komputer yang meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
3. Berkas (*file*), merupakan sekumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu sehingga dapat digunakan kembali dengan mudah.
4. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki
5. Manusia, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi
6. Basis data (*database*) yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data.
7. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Menurut Yusuf (2010: 189), agar penarikan informasi menjadi lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diciptakan suatu sistem informasi yang dapat menggantikan pekerjaan manual menjadi pekerjaan yang dikerjakan secara elektronik yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 pasal 30, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA-BMD) digunakan untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Aplikasi SIMDA-BMD dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan salah satu produk teknologi sistem informasi yang banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi umum yang terdapat pada [www.bpkp.com](http://www.bpkp.com), Aplikasi SIMDA-BMD merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA-BMD mempunyai *output* antara lain :

1. Perencanaan : Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2. Pengadaan : Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Penatausahaan : Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Penghapusan : Surat Keputusan (SK) Penghapusan, Lampiran Surat Keputusan (K) Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
5. Akuntansi Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per OPD.

## Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan suatu sikap seseorang di dalam suatu organisasi yang dapat mengatur dan memberi pengaruh terhadap orang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Menurut Rivai (2008: 248), dan komitmen merupakan penetapan di dalam diri seseorang untuk menerima atau Daerah menolak satu tujuan atau lebih yang menuntun perbuatan atau kegiatannya.

Menurut Trisnawati (2005: 14) kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Berdasarkan pengertian di atas dan dikaitkan dengan kegiatan organisasi pemerintahan maka pemimpin mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka mendorong dan menggerakkan pencapaian tujuan organisasi melalui orang lain. Meyer, Allen, dan Smith (1998) mengemukakan ada tiga dimensi komitmen organisasional (Sopiah, 2008: 157), yaitu:

1. *Affective commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional;
2. *Continuance commitment*, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain, atau karena tidak menemukan pekerjaan lain;
3. *Normative commitment*, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

Menurut Rivai (2008: 45), pemimpin harus menjalin hubungan kerja yang efektif melalui kerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Semua program kerja akan terlaksana berkat bantuan orang-orang yang dipimpin, karena setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri. Menurut Gusman (2012), kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kinerja para pegawai yang berada paling bawah dalam suatu piramida organisasi, dan para pegawai yang bekerja membutuhkan dukungan dari pimpinan. Sebagus apapun gagasan dari bawah tanpa adanya dukungan dari pemimpin maka gagasan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan barang milik daerah.

## Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Azhar (2013) meneliti tentang pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset pada Kota Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja sebagai pengguna, pengurus, dan penyimpan barang pada SKPD Pemko Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Total populasi sasaran adalah 124 orang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda linear. Indikator yang digunakan untuk variabel manajemen aset adalah inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, pengawasan dan pengendalian. Indikator yang digunakan untuk variabel kualitas aparatur daerah adalah pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan pedoman. Untuk variabel regulasi indikator yang digunakan adalah

peraturan dan Surat Keputusan (SK), sedangkan untuk variabel sistem informasi adalah fasilitas memadai, pemahaman pengguna sistem informasi dan peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset, Secara parsial kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara dua variabel bebas lain, regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset.



Darno (2012) meneliti pengaruh kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna (studi pada satuan kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Data diperoleh dari 88 staf penyusun laporan keuangan satuan kerja melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variabel kualitas laporan barang kuasa pengguna diukur dengan indikator: a) andal, b) tepat waktu, dan c) lengkap. Variabel kemampuan sumber daya manusia diukur dengan indikator: a). kapasitas staf, b). tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan c). pengembangan. Variabel pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator: a) perangkat, b) pengelolaan data aset dan keuangan dan c) perawatan. Hasil statistik mengindikasikan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna. Implikasi penelitian ini terhadap satuan kerja adalah satuan kerja harus mengelola sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan barang kuasa pengguna.

Haryanto (2013) meneliti mengenai aset daerah yaitu dengan judul pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelaporan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Penelitian ini dilakukan mengambil sampel pengurus barang/penyimpan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Data diperoleh dari 49 pengurus barang/penyimpan barang yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun laporan aset daerah sebagai bagian dari data penyusun laporan keuangan SKPD/UKPD. Penelitian menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Variabel kualitas laporan barang kuasa pengguna diukur dengan indikator: a) andal, b) tepat waktu, dan c) lengkap. Variabel kemampuan sumber daya manusia diukur dengan indikator: a). kapasitas staf, b). tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan c). pengembangan. Variabel pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator: a) perangkat, b) pengelolaan data aset dan keuangan dan c) perawatan. Hasil uji statistis mengindikasikan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Implikasi penelitian ini terhadap OPD adalah bahwa pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan teknologi informasi dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan OPD.

Inayah (2010) dalam penelitian dengan judul studi persepsi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Variabel komunikasi menggunakan indikator: a) aspek transmisi dalam komunikasi, b) aspek kejelasan dalam komunikasi, c) aspek konsistensi dalam komunikasi, d) mekanisme koordinasi. Variabel sumber daya diukur dengan indikator: a) kuantitas dan kualitas staf, b) kewenangan yang dimiliki staf, c) informasi yang dimiliki staf, d) fasilitas baik fisik maupun financial. Variabel sikap diukur dengan indikator: a) respon implementor terhadap kebijakan (arah respon, macam tanggapan dan intensitas tanggapan), b) pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Variabel struktur birokrasi diukur dengan variabel : a) tersedianya SOP, b) kejelasan aturan/pembagian tugas dalam organisasi, c)

pola-pola hubungan dalam organisasi. Indikator variabel implementasi kebijakan pengelolaan aset adalah : a) kesesuaian implementasi kebijakan dengan peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara komunikasi dan sumber daya terhadap implementasi kebijakan sedangkan disposisi/sikap dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang sedang dan cukup namun tetap signifikan terhadap implementasi kebijakan aset daerah.

Simamora (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah pasca pemekaran dan efeknya pada kualitas laporan keuangan pemerintah Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen aset daerah pasca-ekspansi dan efeknya pada kualitas pelaporan keuangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, dokumentasi penelitian, serta observasi atau triangulasi atau campuran ketiganya. Hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran adalah Sumber daya manusia, bukti kepemilikan aset, penilaian aset, komitmen pimpinan, dan faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

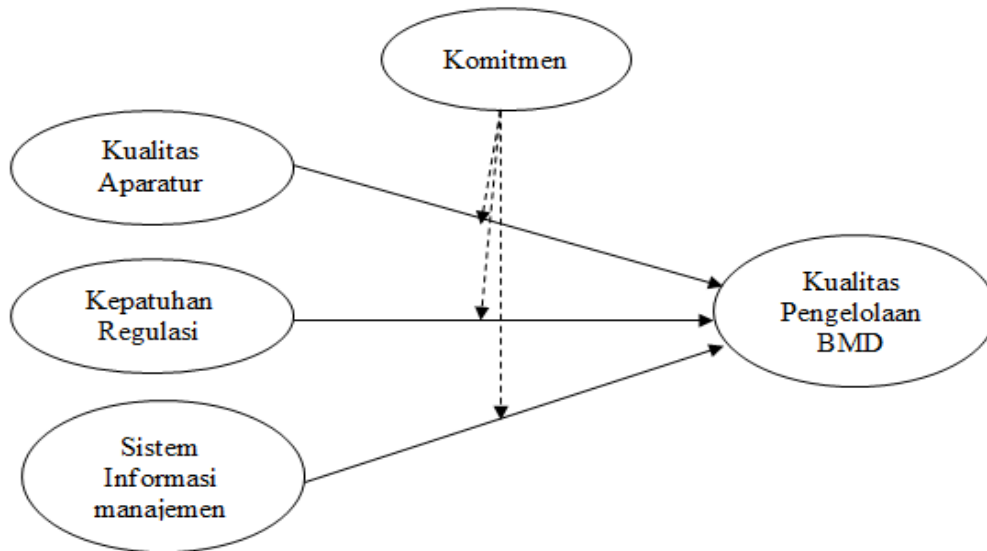
Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H1 : Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
- H2: Kepatuhan Terhadap regulasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah
- H3: Sistem Informasi Manajemen terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah
- H4: Komitmen pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara kualitas aparatur daerah, dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
- H5: Komitmen pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara kepatuhan pada regulasi, kualitas pengelolaan barang milik daerah
- H6: Komitmen pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara sistem informasi manajemen, dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah

### **Model Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu Kualitas Aparatur (X1), Kepatuhan Regulasi (X2), dan Sistem Informasi Manajemen (X3), dan 1 variabel pemoderasi yaitu Komitmen, serta 1 variabel dependen yaitu Kualitas Pengelolaan BMD, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



Sumber: Dikembangkan Sulistiawati (2016)

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian dari peneliti sebelumnya. Pendekatan pada penelitian ini berdasarkan pengukuran dan analisis data merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2013: 35). Metode penelitian ini adalah metode survei dan berdasarkan tingkat eksplanasinya merupakan jenis penelitian asosiatif yang bersifat kausal (*Causal Research*). Penelitian kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel *independen* (Rochaety, dkk, 2007: 27).

### Lokasi, Waktu dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Waropen.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja dalam pengelolaan barang milik daerah di Setiap OPD Kabupaten Waropen. Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Waropen sebanyak 40 OPD. Pada masing-masing OPD akan diberikan 3 (tiga) set kuesioner yang akan diisi oleh responden.

1. Pengguna Barang selaku kepala OPD yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
2. Pengurus Barang OPD yang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang.
3. Penyimpan Barang OPD yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang

Total responden yang menjadi anggota populasi dan akan diberikan kuesioner sebanyak 120 responden. Sampel penelitian menggunakan metode sensus yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel.

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah menggunakan instrumen kuesioner yang diisi oleh pengguna barang OPD, pengurus barang OPD dan penyimpan barang OPD di Kabupaten Waropen. Kuesioner kualitas pengelolaan barang milik daerah merupakan modifikasi dari kuesioner Oktaviana (2010) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Modifikasi dilakukan karena pada kuesioner Oktaviana (2010) belum ada item pertanyaan untuk tuntutan ganti rugi yang merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 pasal 85.

### **Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y)**

Kualitas pengelolaan barang milik daerah dalam penelitian ini adalah terlaksananya proses pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Indikator untuk mengukur kualitas pengelolaan barang milik daerah adalah : (1) perencanaan aset tetap sesuai dengan kebutuhan; (2) proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; (3) penggunaan aset sesuai dengan peruntukannya; (4) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; (5) penatausahaan dilakukan dengan program SIMDA-BMD; (6) pemanfaatan aset dilakukan dalam rangka peningkatan PAD; (7) pengamanan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala; (8) penilaian terhadap perhitungan depresiasi; (9) penghapusan barang milik daerah; (10) pemindahtanganan; (11) adanya pengawasan dilakukan oleh kepala SKPD; (12) pembiayaan; (13) tuntutan ganti rugi. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap Likert. Pernyataan sikap responden terhadap diberikan skor pengukuran: 5 (SS= sudah sepenuhnya), skor 4 (SB= sebagian besar), skor 3 (N= netral), skor 2 (SK=sebagian kecil), dan skor 1 (SSB= sama sekali belum).

### **Kualitas Aparatur Daerah**

Kualitas aparatur daerah didefinisikan sebagai semua potensi yang ada pada petugas pengelola BMD agar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan peraturan. Indikator pengukuran dari kualitas aparatur daerah adalah: (1) pelatihan; (2) pengalaman; (3) jenjang kepangkatan; (4) keahlian. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap *likert*. Menurut Siregar (2012: 25), Skala *Likert* memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu: pernyataan positif dan negatif. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan yang bersifat positif (*favorable*) diberikan skor pengukuran; 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (N=netral), skor 2 (KS=kurang setuju), dan skor 1 (TS=tidak setuju). Untuk Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan yang bersifat negatif (*unfavorable*) diberikan skor: 1 (SS=sangat setuju), skor 2 (S=setuju), skor 3 (N=netral), skor 4 (KS=kurang setuju), dan skor 5 (TS=tidak setuju).

### **Kepatuhan Pada Regulasi**

Kepatuhan pada regulasi didefinisikan sebagai sikap kecenderungan dan keinginan oleh pelaksana pengelola barang milik daerah untuk melaksanakan regulasi pengelolaan barang milik daerah. Indikator pengukuran variabel ini adalah: (1) pemahaman implementor; (2) respon implementor. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap likert. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan diberikan skor pengukuran; 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (W=netral), skor 2 (KS=kurang setuju), dan skor 1 (TS=tidak setuju).

### **Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan dan pemeliharaan perangkat untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Indikator pengukuran dalam sistem informasi manajemen adalah: 1) hardware; 2) *software*; 3) prosedur; 4) jaringan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval, dengan metode pembobotan menggunakan skala sikap likert. Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan yang bersifat positif (*favorable*) diberikan skor pengukuran; 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=setuju), skor 3 (W=netral), skor 2 (KS=kurang setuju), dan skor 1 (TS=tidak setuju). Untuk Pernyataan sikap responden terhadap sebuah pernyataan yang bersifat negatif (*unfavorable*) diberikan skor : 1 (SS=sangat setuju), skor 2 (S=setuju), skor 3 (W=netral), skor 4 (KS=kurang setuju), dan skor 5 (TS=tidak setuju).

### **Metode Analisis Data**

Alat Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* WarpPLS 5.0. PLS – SEM digunakan untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun nonlinear dengan banyak indikator baik berbentuk reflektif, formatif dan MIMIC. Berbeda dengan analisis multivariate biasa, PLS lebih *powerful* karena dapat digunakan untuk membangun model penelitian dengan banyak variabel dan indikator (Ghozali & Latan, 2014).

Terdapat alasan utama yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu penelitian. Pertama, PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis dan *residual distribution*. Kedua, PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi dan juga tidak mengisyaratkan data harus berdistribusi normal. Ketiga, PLS memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis *series ordinary least square* (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan *algoritma*. Keempat, pada pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* dapat digunakan untuk menjelaskan. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi *unidentified* model.

Langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan PLS adalah sebagai berikut:

### 1. Evaluasi Model Pengukuran atau *Outer Model*

Evaluasi model pengukuran atau *Outer model* dilakukan untuk menilai reabilitas dan validitas dari indikator – indikator pembentuk konstruk laten. Pengujian yang dilakukan dalam *outer model* adalah:

#### a. *Covergent Validity*

*Covergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construc score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup.

#### b. *Discriminat Validity*

*Discriminat validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai *discriminat validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dimana nilai AVE harus > 0,50.

#### c. *Composite Reliability*

*Composite reliability* blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* yang dikembangkan oleh Werta, Linn, dan Joreskog dan *Cronbach's Alpha*. Dimana nilai *composite reliability* yang baik apabila nilainya > 0,70.

### 2. Evaluasi Model Struktural atau *Inner Model*

*Inner model* merupakan model yang menspesifikasi hubungan antarvariabel laten. Pengujian yang dilakukan dalam *inner model* adalah:

#### a. *R-square* ( $R^2$ )

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat  $R^2$  untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai  $R^2$  dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

#### b. *Q-square* ( $Q^2$ )

Disamping melihat nilai  $R^2$ , model PLS juga dievaluasi dengan melihat  $Q^2$  *predictive relevance* untuk model konstruk.  $Q^2$  mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai  $Q^2 > 0$  (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan jika nilai  $Q^2 < 0$  (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki nilai *predictive relevance*.

### 3. Mengkonstruksi Diagram Jalur

#### 1) Estimasi

Nilai estimasi koefisien jalur antara konstruk harus memiliki nilai yang signifikan. Signifikansi hubungan dapat diperoleh dengan prosedur Bootstapping. Nilai yang dihasilkan berupa nilai t-hitung yang kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Apabila nilai

t-hitung > t-tabel (1,95) pada taraf signifikansi 0,05 maka nilai estimasi koefisien jalur tersebut signifikan.

#### 2) *Goodness of fit*

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui berbagai kriteria *goodness of fit*. *Goodness of fit* dalam PLS dibagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut.

##### a. *OuterModel*

Wiyono (2011:403) dalam Latan & Ghozali, (2014) menyatakan kriteria yang digunakan dalam menilai indikator adalah :

1. *Convergent validity* nilai *loading factor* 0,50 sampai 0,60.
2. *Discriminant validity* nilai korelasi *cross loading* dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain.
3. Nilai AVE harus diatas 0,50.
4. Nilai *composite reliability* yang baik apabila memiliki nilai  $\geq 0,70$ .

##### b. *InnerModel*

*Goodness of fit* pada *inner model* diukur menggunakan *R square* variabel laten dependen, *Q square predictive relevance* untuk model struktural yang digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* yang baik, sebaliknya jika nilai *Q square*  $\leq 0$  menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*.

### Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada pengujian *inner model* yaitu :

#### 1. *T statistic*

Apabila koefisien *t statistic* menunjukkan koefisien yang lebih besar dari t tabel, hasil ini menggambarkan variabel tersebut signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna pada variabel laten terhadap variabel laten lainnya.

#### 2. *Path Coefficients*

Nilai *path coefficients* menunjukkan koefisien hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya. Sedangkan besarnya pengaruh total variabel laten terhadap variabel laten lainnya (*total effect*) diperoleh melalui hasil tambah antara pengaruh langsung (*direct effect*) dengan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) yang dimiliki.

### 3. Pengujian Variabel Moderasi

Pengujian variabel moderasi ini dapat dilihat dari perbandingan pengaruh langsung dengan *total effect*, apabila pengaruh langsung lebih kecil daripada *total effect* maka terbukti bahwa variabel sensitivitas moral sebagai variabel *moderating*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Penelitian

#### Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu pada OPD di Pemerintahan Kabupaten Waropen. Dengan sampel adalah pegawai yang berkerja pada bagian pengelolaan barang milik daerah. Proses pendistribusian kuesioner dan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 minggu yaitu dari tanggal 02 Juli 2018 sampai 29 Juli 2018.

**Tabel 1. Pengumpulan Data**

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
Distribusi Kuesioner	90	100%
Kuesioner yang Kembali	54	60%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang rusak	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	36	40%
Kuesioner Tidak Lengkap	18	20%

*Sumber : Data Primer diolah, 2018*

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada kuesioner yang disebar pada setiap dinas di Kabupaten Waropen adalah pegawai yang bekerja pada bidang pengelolaan barang milik Daerah, Pengguna BMD, Pengurus BMD dan Penyimpan BMD menurut, jenis kelamin, lama menjabat dan tingkat pendidikan. Dari kuesioner yang dibagikan menghasilkan 36 responden yang digunakan pada penelitian ini. Distribusi kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 2. Disribusi Responden**

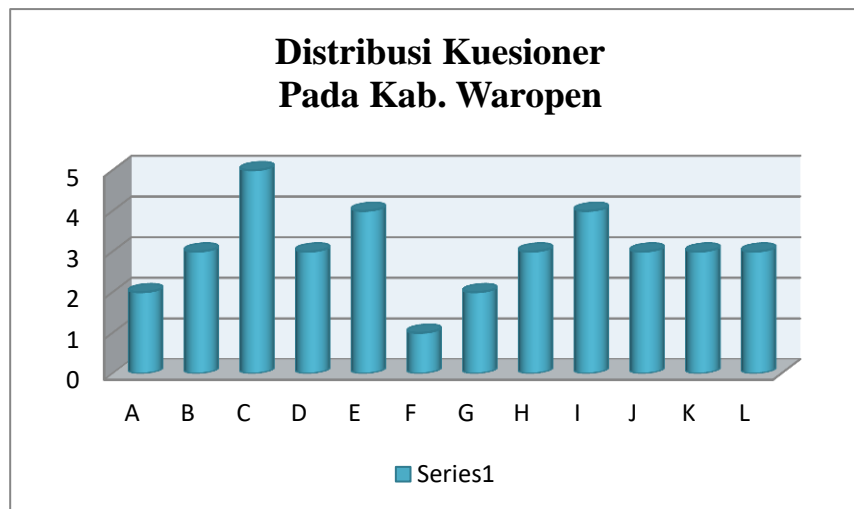
No	Nama Instansi	Jumlah
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	2
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
3	BPKAD	5
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
5	Dinas Kesehatan	4
6	Dinas Perindakop UKM dan Transportasi	1
7	Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	2
8	Dinas Pekerjaan Umum	3
9	Dinas Sosial	4
10	Inspektorat	3
11	SATPOL PP	3
12	Sekretariat Daerah	3



*Sumber : Data Primer diolah, 2018*

Berdasarkan tabel 2 bahwa responden terbanyak ada pada Dinas BPKAD yang berjumlah 5 responden, sedangkan responden paling sedikit ada pada dinas Perindakop UKM dan Transportasi. Selain itu jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Grafik Penyebaran Kuesioner**



*Sumber : Data Primer diolah, 2018*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Dinas A yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi terdapat 2 responden, Dinas B adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3 responden, Dinas yaitu BPKAD sebanyak 5 responden, Dinas D merupakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 3 responden, Dinas E yaitu Dinas Kesehatan sebanyak 4 responden. Dinas F yaitu Dinas Perindakop UKM dan Transportasi sebanyak 1 responden. Dinas G adalah Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi sebanyak 2 responden . Dinas H yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 Responden, Dinas I yaitu Dinas Sosial terdapat 4 responden, Dinas J adalah Inspektorat yang berjumlah 3 rsponden, Dinas K yaitu Satpol PP berjumlah 3 responden, dan Dinas L yaitu Sekretariat Daerah sebanyak 3 responden.

### **Statistik Deskriptif Penelitian**

Pengolahan data dari data mentah yang telah terkumpul disimpan dan diolah dalam program SPSS versi 21. Pada analisis deskriptif peneliti menampilkan tabel distribusi frekuensi dari lima variabel yaitu Pengelolaan BMD, Kualitas Aparatur Daerah, Kepatuhan Regulasi, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Pimpinan. Adapun perhitungan analisis deskriptif berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pernyataan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPL	35	57.00	75.00	68.4571	4.64215
TKA	35	21.00	35.00	31.4571	3.27506
TKEP	35	28.00	39.00	32.4857	2.62758
TSIM	35	20.00	26.00	21.6857	1.20712
TKOM	35	22.00	32.00	26.6571	2.04282
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data diolah SPSS, 2018

Hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 3 yang merupakan hasil pengukuran deskriptif masing-masing variabel dari 36 data pengamatan, menunjukkan rentang skala teoritis dari nilai *minimum* dan *maximum*, kemudian hasil nilai rata-rata (*mean*) serta nilai dari standar deviasinya. Penjelasan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Pengelolaan BMD merupakan variabel dependen ( $Y$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 15 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 15 – 75. Dari Tabel 4.3 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 57 dan nilai *maximum* sebesar 75. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 68,457 dan standar deviasinya sebesar 4,64.

Variabel Kualitas Aparatur merupakan variabel independen pertama ( $X_1$ ) dari penelitian ini yang menggunakan item pertanyaan yang awalnya 7 item sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 7 – 35. Dari Tabel 4.3 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 21 dan nilai *maximum* sebesar 35. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 31,45 dan standar deviasinya sebesar 3,27.

Variabel Kepatuhan Regulasi merupakan variabel independen kedua ( $X_2$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 9 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 9 – 45. Dari Tabel 4.3 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 28 dan nilai *maximum* sebesar 39. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 32,48 dan standar deviasinya sebesar 2,62.

Variabel Sistem Informasi Manajemen merupakan variabel independen ketiga ( $X_3$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 7 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 7 – 35. Dari Tabel 4.3 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 20 dan nilai *maximum* sebesar 26. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 32,48 dan standar deviasinya sebesar 2,62.

Variabel Komitmen Pimpinan merupakan variabel moderasi dari penelitian ini yang menggunakan 7 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 7 – 35. Dari Tabel 4.3 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 22 dan nilai *maximum* sebesar 32. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 26,45 dan standar deviasinya sebesar 2,042.

## Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas

### Uji Validitas

Sebelum menganalisis dan menginterpretasi data penelitian terlebih dahulu harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ditujukan untuk mengetahui ketepatan atau kecepatan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur di dalam item kuesioner. Sebaliknya uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran dapat diandalkan dan tetap konsisten bila pengukuran tersebut di ulang kembali. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - k$  dengan  $\alpha$  0,05. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai  $r$  positif, maka butir atau pernyataan tersebut dikatakan valid. Di samping itu validitas instrumen juga perlu diuji secara statistik, yaitu dengan melihat tingkat signifikansi untuk masing-masing instrumen.

Dalam hal ini digunakan skor total *Pearson correlation*, sedangkan uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan *alpha cronbach*, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila memiliki koefisien atau reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dan diujikan pada 36 responden secara acak. Hasil selengkapnya pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Nomor Indikator	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Keterangan
			5% nilai $r$ product momen N= 36	
Pengelolaan BMD	1	0.877	0.329	Valid
	2	0.925	0.329	Valid
	3	0.877	0.329	Valid
	4	0.925	0.329	Valid
	5	0.850	0.329	Valid
	6	0.930	0.329	Valid
	7	0.950	0.329	Valid
	8	0.877	0.329	Valid
	9	0.475	0.329	Valid
	10	0.550	0.329	Valid
	11	0.712	0.329	Valid
	12	0.610	0.329	Valid
	13	0.890	0.329	Valid
	14	0.079	0.329	Valid
	15	0.677	0.329	Valid
Kualitas Aparatur	1	0.566	0.329	Valid
	2	0.614	0.329	Valid
	3	0.484	0.329	Valid
	4	0.513	0.329	Valid

	5	0.513	0.329	Valid
	6	0.513	0.329	Valid
	7	0.513	0.329	Valid
Kepatuhan regulasi	1	0.478	0.329	Valid
	2	0.441	0.329	Valid
	3	0.527	0.329	Valid
	4	0.383	0.329	Valid
	5	0.977	0.329	Valid
	6	0.361	0.329	Valid
	7	0.721	0.329	Valid
Sistem Infor-nasi Manajemen	8	0.421	0.329	Valid
	9	0.451	0.329	Valid
	1	0.387	0.329	Valid
	2	0.530	0.329	Valid
	3	0.330	0.329	Valid
	4	0.320	0.329	Valid
	5	0.387	0.329	Valid
Komitmen Pimpin-an	6	0.450	0.329	Valid
	7	0.440	0.329	Valid
	1	0.551	0.329	Valid
	2	0.551	0.329	Valid
	3	0.352	0.329	Valid
	4	0.369	0.329	Valid
	5	0.630	0.329	Valid
	6	0.605	0.329	Valid
	7	0.338	0.329	Valid

*Sumber : Data diolah Warppls, 2018*

Pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,329$  dengan  $\alpha = 0,05$  atau 5% sehingga instrument yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk seluruh responden.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbach Alfa	Keterangan
Pengelolaan BMD	0.885	Reliabel
Kualitas Aparatur	0.920	Reliabel
Kepatuhan Regulasi	0.647	Reliabel
Sistem Infromasi Manajemen	0.652	Reliabel
Komitmen Pimpinan	0.712	Reliabel

*Sumber : Data diolah Warppls, 2018*

Pada tabel 5. dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini diatas 0,60 yang berarti reliabel, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini reliabel.

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Langkah selanjutnya yaitu evaluasi *outer model* dilakukan tiga kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *conposite reliability*. Berikut hasil pengolahan data.

#### a. *Convergent Validity*

*Convergent Validity* dari model pengukuran dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk nilai p-value <0,50 dianggap signifikan. Machfud dan Dwi menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, syarat loading di atas 0,70 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, *loading factor* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa indikator dengan *loading* <0,40 harus dihapus dari model. Penghapusan indikator dengan *loading* antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan *Composite reliability* di atas nilai batasnya. Nilai batasan untuk AVE 0,50 dan *composite reliability* adalah 0,70. Berikut hasil *output combined loading and cross-loading*:

**Tabel 6. *Output Combined Loading and Cross-loading***

Variabel	SE	Indikator	Croos Loading	P Value	Keterangan
Pengelolaan BMD	0.109	PL1	0.950	<0.001	Valid
	0.108	PL2	0.972	<0.001	Valid
	0.109	PL3	0.964	<0.001	Valid
	0.108	PL4	0.972	<0.001	Valid
	0.110	PL5	0.937	<0.001	Valid
	0.111	PL6	0.922	<0.001	Valid
	0.109	PL7	0.954	<0.001	Valid
	0.109	PL8	0.964	<0.001	Valid
	0.128	PL9	0.605	<0.001	Valid
	0.161	PL10	0.405	<0.001	Valid
	0.163	PL11	0.800	<0.001	Valid
	0.125	PL12	0.664	<0.001	Valid
	0.161	PL13	0.409	<0.001	Valid
	0.162	PL14	0.961	<0.001	Valid
	0.164	PL15	0.672	<0.001	Valid
Kualitas Aparatur	0.161	KA1	0.710	<0.001	Valid
	0.113	KA2	0.878	<0.001	Valid
	0.108	KA3	0.982	<0.001	Valid
	0.109	KA4	0.965	<0.001	Valid
	0.108	KA5	0.980	<0.001	Valid
	0.109	KA6	0.965	<0.001	Valid
	0.108	KA7	0.980	<0.001	Valid
Kepatuhan regulasi	0.125	KEP1	-0.663	<0.001	Valid
	0.148	KEP2	0.490	<0.001	Valid

	0.145	KEP3	0.439	<0.001	Valid
	0.133	KEP4	0.522	<0.001	Valid
	0.122	KEP5	0.704	<0.001	Valid
	0.122	KEP6	0.710	<0.001	Valid
	0.120	KEP7	0.738	<0.001	Valid
	0.133	KEP8	-0.519	<0.001	Valid
	0.122	KEP9	0.710	<0.001	Valid
Sistem Informasi					
Manajemen	0.118	SIM1	0.774	<0.001	Valid
	0.126	SIM2	0.644	<0.001	Valid
	0.134	SIM3	-0.506	<0.001	Valid
	0.119	SIM4	0.769	<0.001	Valid
	0.127	SIM5	0.627	<0.001	Valid
	0.138	SIM6	0.441	0.002	Valid
	0.145	SIM7	0.427	0.016	Valid
Komitmen Pimpinan	0.114	KOM1	0.866	<0.001	Valid
	0.114	KOM2	0.866	<0.001	Valid
	0.145	KOM3	0.329	0.015	Valid
	0.122	KOM4	-0.714	<0.001	Valid
	0.147	KOM5	-0.499	<0.001	Valid
	0.113	KOM6	0.878	<0.001	Valid
	0.120	KOM7	0.738	<0.001	Valid

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

Setelah didapatkan hasil *combined loading and cross loadings*, sesuai kriteria pada penjas di atas, bahwa nilai untuk *loading factor* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Penghapusan indikator dengan *loading* antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE > 0,50 dan *composite reliability* adalah >0,70.

#### b. Discriminant Validity

Terdapat dua cara untuk mengevaluasi terpenuhinya validitas diskriminan yaitu; pertama, dengan melihat *loading* konstruk laten yang akan memprediksi indikatornya/dimensi lebih baik daripada konstruk lainnya. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka validitas diskriminan terpenuhi, kedua, untuk dapat menganalisa *discriminant validity* yaitu dengan kriteria AVE. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat (*square roots*) *average variance extracted* (AVE), yaitu kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (atas atau bawahnya).

1. Metode pertama dengan melihat *loading* ke konstruk lain. Adapun hasil dari *loading* bisa dilihat pada tabel 7

**Tabel 7. Output Nilai Loading Konstruk Laten**

Indikator	Loading	Nilai loading ke konstruk lain					Keterangan
		PL	KA	KEP	SIM	KM	
PL1	0.950		0.039	-0.108	0.188	0.025	Memenuhi Discriminant Validity
PL2	0.972		-0.231	-0.137	0.227	0.212	Memenuhi Discriminant Validity
PL3	0.964		-0.147	0.129	-0.150	-0.098	Memenuhi Discriminant Validity
PL4	0.972		-0.231	-0.137	0.227	0.212	Memenuhi Discriminant Validity
PL5	0.937		-0.109	-0.063	0.190	0.106	Memenuhi Discriminant Validity
PL6	0.922		0.147	-0.038	0.155	-0.070	Memenuhi Discriminant Validity
PL7	0.954		0.080	0.146	-0.171	-0.248	Memenuhi Discriminant Validity
PL8	0.964		-0.147	0.129	-0.150	-0.098	Memenuhi Discriminant Validity
PL9	0.605		1.204	0.115	-0.342	-0.490	Memenuhi Discriminant Validity
PL10	0.405		-0.479	-0.041	-0.171	-0.567	Memenuhi Discriminant Validity
PL11	0.800		-0.830	-0.284	0.233	0.592	Memenuhi Discriminant Validity
PL12	0.664		-0.035	-0.086	-0.324	0.371	Memenuhi Discriminant Validity
PL13	0.409		0.155	-0.276	0.514	0.824	Memenuhi Discriminant Validity
PL14	0.961		0.730	-0.597	0.715	0.165	Memenuhi Discriminant Validity
PL15	0.672		0.230	0.085	-0.323	-0.042	Memenuhi Discriminant Validity
KA1	0.710	0.142		0.801	-0.447	-0.048	Memenuhi Discriminant Validity
KA2	0.878	-0.138		-0.154	0.113	-0.016	Memenuhi Discriminant Validity
KA3	0.982	0.070		0.150	-0.128	-0.101	Memenuhi Discriminant Validity
KA4	0.965	0.277		0.249	-0.185	-0.206	Memenuhi Discriminant Validity
KA5	0.980	-0.238		-0.210	0.172	0.258	Memenuhi Discriminant Validity
KA6	0.965	0.277		0.249	-0.185	-0.206	Memenuhi Discriminant Validity
KA7	0.980	-0.238		-0.210	0.172	0.258	Memenuhi Discriminant Validity
KEP1	-0.663	0.207	0.339		0.040	0.021	Memenuhi Discriminant Validity
KEP2	0.490	0.141	-0.630		0.699	0.698	Memenuhi Discriminant Validity
KEP3	0.439	0.426	-1.385		-0.028	0.571	Memenuhi Discriminant Validity
KEP4	0.522	-0.104	0.866		0.173	0.055	Memenuhi Discriminant Validity

KEP5	0.704	0.446	-0.491		-0.189	0.024	Memenuhi Discriminant Validity
KEP6	0.710	-0.263	0.795		-0.071	-0.210	Memenuhi Discriminant Validity
KEP7	0.738	0.407	0.289		0.222	-0.120	Memenuhi Discriminant Validity
KEP8	-0.519	0.103	1.174		0.049	-0.778	Memenuhi Discriminant Validity
KEP9	0.710	-0.263	0.795		-0.071	-0.210	Memenuhi Discriminant Validity
SIM1	0.774	0.407	0.289	0.543		-0.120	Memenuhi Discriminant Validity
SIM2	0.644	0.106	0.172	-0.792		-0.127	Memenuhi Discriminant Validity
SIM3	-0.506	-0.231	1.084	-0.660		-0.181	Memenuhi Discriminant Validity
SIM4	0.769	-0.779	-0.100	-0.357		0.739	Memenuhi Discriminant Validity
SIM5	0.627	0.043	0.074	-0.159		0.121	Memenuhi Discriminant Validity
SIM6	0.441	-0.175	-0.291	-0.118		-0.464	Memenuhi Discriminant Validity
SIM7	0.427	-0.458	-1.139	-0.556		1.093	Memenuhi Discriminant Validity
KOM1	0.866	0.314	0.226	-0.060	0.340		Memenuhi Discriminant Validity
KOM2	0.866	0.314	0.226	-0.060	0.340		Memenuhi Discriminant Validity
KOM3	0.329	-0.417	1.074	-0.653	-0.490		Memenuhi Discriminant Validity
KOM4	-0.714	-0.000	0.674	-0.392	0.270		Memenuhi Discriminant Validity
KOM5	-0.499	0.461	-0.403	0.173	0.760		Memenuhi Discriminant Validity
KOM6	0.878	-0.158	0.133	-0.432	0.428		Memenuhi Discriminant Validity
KOM7	0.738	-0.175	-0.678	0.635	-0.519		Memenuhi Discriminant Validity

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

Berdasarkan tahap pertama dari hasil di atas, keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator sudah memenuhi kriteria validitas konvergen.

## 2. Metode Kedua (Kriteria AVE)

Metode ini dapat dilakukan dengan melihat kriteria AVE. AVE yang berada dalam kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten



**Tabel 8. Coefficiens Among Latent Variables**

	PL	KA	KEP	SIM	KOM	KOM*KA	KOM*KEP	KOM*SIM
PL	0.737	0.620	-0.438	-0.486	0.625	-0.606	0.594	0.566
KA	0.620	0.888	-0.365	-0.455	0.804	-0.803	0.509	0.571
KEP	-0.438	-0.365	0.799	0.656	-0.381	0.406	-0.336	-0.506
SIM	-0.486	-0.455	0.656	0.704	-0.571	0.540	-0.557	-0.608
KOM	0.625	0.804	-0.381	-0.571	0.710	-0.650	0.461	0.521
KOM*KA	-0.606	-0.803	0.406	0.540	-0.650	0.738	-0.761	-0.807
KOM*KEP	0.594	0.509	-0.336	-0.557	0.461	-0.761	0.754	0.716
KOM*SIM	0.566	0.571	-0.506	-0.608	0.521	-0.807	0.616	0.761

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

### c. Composite Reliability

Pengujian selanjutnya adalah uji realibilitas konstruk yang dapat diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* >0,70. Berikut ini hasil dari *output latent variable coefficients*, ditunjukkan pada tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Output Latent Variable Coefficients**

	PL	KA	KEP	SIM	KOM
<i>R-Squared</i>	0.873				
<i>Adj R-Squared</i>	0.846				
<i>Composite Reliability</i>	0.915	0.956	0.976	0.769	0.771
<i>Crombach Alfa</i>	0.885	0.920	0.647	0.652	0.712
<i>Avg.Var.Extract</i>	0.543	0.789	0.359	0.365	0.504
<i>Full Collin VIF</i>	2.355	5.302	2.494	2.719	3.677
<i>Q-Squared</i>	0.608				

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

### Evaluasi Model Struktural

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi *structural (Inner Model)* yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*) *path coefficient* dan  $R^2$ . Untuk menilai hasil suatu model dikatakan fit dalam program WarpPLS 5.0 dapat dilihat dari *output general results*. Terlihat pada model *fit indices and p-value* menampilkan hasil sepuluh *indicator fit*, yaitu:

**Tabel 10. Model Fit and Quality Indices Tahap I**

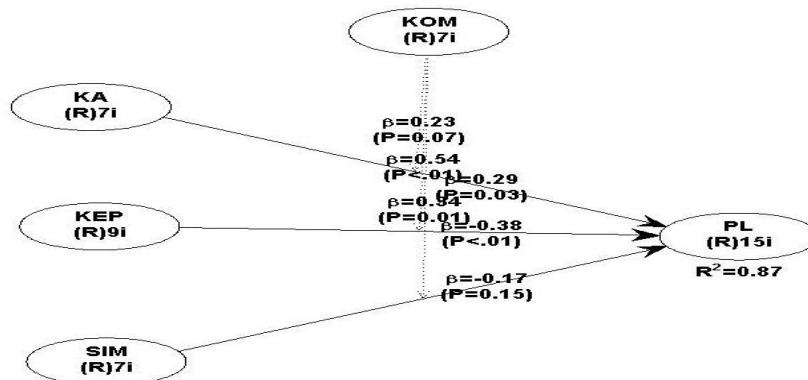
<i>Model fit and quality indices</i>	Indeks	<i>p-value</i>	Kriteria	Keterangan
<i>Average path coefficient (APC)</i>	0,142	P < 0,001	P < 0.05	Diterima
<i>Average R-Squared (ARS)</i>	0,174	P < 0,001	P < 0.05	Diterima
<i>Average Adjusted R-Squared</i>	0,169	P < 0,001	P < 0.05	Diterima
<i>Average Block Variance Inflation Factor (AVIF)</i>	0,465	$\leq 5$ dan idealnya $\leq 3,3$		Diterima

<i>Average Full Collonearity VIF (AFVIF)</i>	0,309	$\leq 5$ dan idealnya $\leq 3,3$	Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0,310	small $\geq 0,1$ , medium $\geq 0,25$ , large $\geq 0,36$	Small
<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	1,000	$\geq 0,7$ dan idealnya =1	Diterima
<i>R-Squared Contribution Ratio (RSCR)</i>	1,000	$\geq 0,9$ dan idealnya =1	Diterima
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	1,000	$\geq 0,7$	Diterima
<i>Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	1,000	$\geq 0,7$	Diterima

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

Pada keterangan di atas nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria belum terpenuhi, sehingga dapat dikatakan model tersebut belum memenuhi persyaratan model fit. Oleh karena itu, untuk mendapatkan model yang fit maka indikator-indikator yang tidak memenuhi kriteria *combined loading and cross-loading* harus di keluarkan. Hasil estimasi model *indirect effect* dapat dilihat pada gambar 3 :

**Gambar 3**  
*Indirect and Direct Effect*



Sumber : Data diolah Warppls, 2018

### Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Berikut ini merupakan data *output path coefficients* dan P Values yang diperoleh dari pengolahan data, dengan menguji pengaruh langsung atau *direct effect* dapat dilihat pada tabel 11:

**Tabel 11. Hasil Output Path Coefficients Model Direct Effect**

Variabel	Path coefficients	P value	Keterangan
Kualitas Aparatur → Pengelolaan BMD	0,293	0,028	Diterima
Kepatuhan Regulasi → Pengelolaan BMD	-0,384	0,005	Diterima
Sistem Informasi Manajemen → Kualitas Pengelolaan BMD	-0,164	0,148	Ditolak

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

Sedangkan hasil uji pengaruh langsung atau *indirect effect* dapat dilihat pada tabel 12:

**Tabel 12. Hasil Output Path Coefficients Model Indirect Effect**

Variabel	Path coefficients	P value	Keterangan
KOM*KA→ Pengelolaan BMD	0,230	0,070	Ditolak
KOM*KEP→ Pengelolaan BMD	0,541	0,001	Diterima
KOM*SIM→ Pengelolaan BMD	0,339	0,012	Diterima

Sumber : Data diolah Warppls, 2018

## PEMBAHASAN

### Uji Hipotesis 1 (H1) Pengaruh Kualitas Aparatur Terhadap Pengelolaan BMD

Pengujian hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa Kualitas Aparatur terhadap Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Waropen dapat diterima dan terbukti benar dimana hasilnya dibuktikan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai p. Dari hasil pengujian diatas, terlihat nilai *Path coefficients* adalah sebesar 0,293 dan signifikan pada 0,028 lebih kecil dari  $p < 0,05$  atau 5%, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2010) menunjukkan bahwa faktor kualitas staf yang menjadi pelaksana pengelola Barang Milik Daerah akan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya. Ishak (2002:5) menyatakan bahwa sumberdaya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas. Banyaknya modal yang berhasil dikumpulkan, akan hilang tanpa makna jika sumberdaya manusia sebagai pengelolanya tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk mengurus modal tersebut. Selain itu, diyakini pula bahwa sumberdaya manusia merupakan aset terpenting dan sentral untuk memajukan suatu organisasi. Di sini, kemampuan diartikan sebagai suatu kapasitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, banyak tugas yang diemban oleh sumberdaya manusia pemerintah daerah. Diawali dari perencanaan, pengajuan pengadaan aset hingga pada metode pemeliharaan aset dan penghapusan aset yang bersangkutan. Pola pemeliharaan aset tersebut, tidak hanya mencakup unsur pengawasan saja tetapi juga mencakup aspek optimalisasi pemanfaatannya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah (Ishak, 2002:6).

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Azhar, dan Abdullah (2013), yang menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset dikarenakan banyak pengurus barang yang belum memenuhi syarat pendidikan tertentu, kurangnya sosialisasi terhadap pengelola barang, pengurus barang tidak mengetahui tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, dan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah belum disusun secara rinci dan disesuaikan dengan kondisi daerah dalam mengatur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Waropen.

### **Uji Hipotesis 2 (H2) Pengaruh Kepatuhan Regulasi Terhadap Pengelolaan BMD**

Pengujian hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Regulasi terhadap Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Waropen dapat diterima dan terbukti benar dimana hasilnya dibuktikan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai p. Dari hasil pengujian diatas, terlihat nilai *Path coefficients* adalah sebesar -0,384 dan signifikan pada 0,005 lebih kecil dari  $p < 0,05$  atau 5%, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Variabel kepatuhan pada regulasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan adanya pemahaman dan respon yang baik oleh pengelola Barang Milik Daerah terhadap regulasi yang berlaku dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Azhar, dan Abdullah (2013) yang membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara regulasi dengan manajemen aset daerah, karena regulasi merupakan alat bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan manajemen aset daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan Negara agar berjalan dengan lancar, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan Negara (pemerintah), artinya setiap pemerintah dan penyelenggara negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain pemerintah tidak boleh berkuasa mutlak, tanpa batas. Menurut Nancy (2015), diperlukan sikap para implementor yang konsisten bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian sebuah kebijakan pengelolaan barang milik daerah, karena sikap ini menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah implementasi kebijakan.

### **Uji Hipotesis 3 (H3) Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pengelolaan BMD**

Pengujian hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Manajemen terhadap Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Waropen dapat ditolak dan terbukti benar dimana hasilnya dibuktikan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai p. Dari hasil pengujian diatas, terlihat nilai *Path coefficients* adalah sebesar -0,164 dan signifikan pada 0,148 lebih besar dari  $p > 0,05$  atau 5%, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darno (2012) dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan aset daerah.

Aplikasi SIMDA-BMD merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. belum memadai untuk proses pendataan asset atau barang daerah dalam penatausahaan asset atau barang milik daerah, merupakan kendala yang wajar dalam sebuah sistem informasi manajemen oleh karena itu dibutuhkan analisis sistem dan pengembangan sistem agar kelemahan

dan kekurangan dari sistem informasi manajemen yang ada bisa di perbaiki. “Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya”. (Jogyanto, 2005, h.129). Selain diperlukan adanya analisis sistem, dalam aplikasi SIMDA BMD juga dibutuhkan adanya pengembangan sistem guna meningkatkan kinerja sistem dalam penatausahaan *asset* atau barang milik daerah di Kabupaten Waropen, seperti menurut Jogyanto (2005) Pengembangan sistem (*system development*) berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.

Kurangnya ketersediaan data di lapangan merupakan salah satu permasalahan dalam penatausahaan *asset* atau barang milik daerah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010) belum dilakukannya inventarisasi seluruh *asset* daerah hal ini disebabkan karena pencatatan yang tidak tertib, ada catatannya tetapi tidak ada barangnya; adanya data inventaris *asset* atau barang milik daerah yang berbeda-beda antara yang terdapat di satuan kerja dengan data yang terdapat di bagian umum OPD, dan di Bidang Aset BPKAD; tidak dilakukan pencatatan mengenai mutasi barang dan tidak adanya pengamanan yang memadai. Di samping masalah ketersediaan data dilapangan, menurut Mahmudi (2010) lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan asset atau barang milik daerah merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam proses penatausahaan *asset* atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang teknologi informasi khususnya bagi operator SIMBADA, menyebabkan lemahnya koordinasi untuk proses pengelolaan asset atau barang milik daerah melalui SIMBADA. Dengan kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam bidang teknologi informasi yang notabene merupakan pengetahuan dasar untuk pengaplikasian dari SIMBADA, maka akan mengakibatkan lemahnya koordinasi dalam proses penatausahaan *asset* melalui SIMBADA.

#### **Uji Hipotesis 4 (H4) Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Pengelolaan BMD**

Pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi kualitas aparatur terhadap pengelolaan BMD, dimana nilai *Path coefficients* sebesar 0,230 dengan *p-value* 0.070 atau lebih besar dari  $p < 0,05$  atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan **di tolak**. Hal ini disebabkan oleh kendala ditemukan dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, penghapusan dan penatausahaan. Pada saat kepemimpinan yang lama, lemahnya komitmen organisasi dan pimpinan berupa ketegasan dalam pelaksanaan pengelolaan aset, menjadi kendala serta berpengaruh terhadap jalannya pengelolaan aset daerah yang baik.

Tidak adanya sistem pemberian penghargaan maupun sanksi bagi OPD maupun pengurus barang yang patuh ataupun lalai dalam melaksanakan proses pengelolaan aset yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kendala komitmen pimpinan berupa tidak adanya kesesuaian antara perilaku pimpinan dengan regulasi yang menyatakan bahwa dalam proses penggunaan harus ditetapkan dengan adanya SK dari bupati yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas melalui Sekertaris Daerah. Ketetapan dalam bentuk SK Bupati ini mengatur tentang penunjukkan pengurus barang untuk tiap-tiap OPD. Kurangnya pemahaman dan ketegasan dari pimpinan membuat proses penatausahaan aset daerah menjadi tidak baik dan tidak optimal serta membuat para pelaksana di masing-masing OPD lalai dan tidak berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola aset dengan baik dan bertanggungjawab.

### **Uji Hipotesis 5 (H5) Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kepatuhan Regulasi Terhadap Pengelolaan BMD**

Pengujian hipotesis 5 (H5) menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi kepatuhan regulasi terhadap pengelolaan BMD, dimana nilai *Path coefficients* sebesar 0,541 dengan *p-value* 0.001 atau lebih besar dari  $p < 0,05$  atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan **diterima**.

Dalam implementasi pengelolaan BMD Komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor penting dan paling besar pengaruhnya dalam mendukung regulasi yang berlaku terkait pengelolaan BMD. Selain itu dukungan dari pejabat dibawahnya dan kapasitas sumber daya manusia pada unit teknis terkait untuk dapat merespon secara cepat pelaksanaan pengelolaan BMD. Sehingga pemerintah yang mempunyai komitmen pimpinan yang tinggi menghasilkan proses pengelolaan BMD yang tidak menemui banyak kendala.

### **Uji Hipotesis 6 (H6) Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pengelolaan BMD**

Pengujian hipotesis 6 (H6) menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh sebagai variabel moderasi sistem informasi manajemen terhadap pengelolaan BMD, dimana nilai *Path coefficients* sebesar 0,339 dengan *p-value* 0.012 atau lebih besar dari  $p < 0,05$  atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan **diterima**.

Penerapan sistem teknologi informasi memerlukan komitmen pimpinan agar menyediakan peralatan dari *hardware*, *software* dan jaringan yang memadai untuk kelancaran proses penatausahaan barang milik daerah. Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan komitmen pimpinan. Sejalan dengan pendapat Sugito (2014) bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah kurang memiliki komitmen dalam pengelolaan barang milik daerah. Kepala SKPD mau berkomitmen dalam pengelolaan barang milik daerah, seharusnya bisa mengkordinasikan pengurus/penyimpan barang dan seksi akuntansi agar berkomunikasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan laporan dengan cara rekonsiliasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi memperkuat penerapan sistem teknologi informasi dengan kualitas pengelolaan barang milik daerah sehingga semakin tinggi komitmen organisasi dengan menerapkan sistem teknologi informasi maka kualitas pengelolaan barang milik daerah semakin meningkat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan Barang Milik daerah dengan variabel Komitmen Pimpinan sebagai variabel Moderasi yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kualitas Aparatur berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah.
- b. Kepatuhan Regulasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah.
- c. Sistem Informasi Manajemen tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah.
- d. Komitmen Pimpinan tidak mampu memoderasi kualitas apartur daerah terhadap kualitas pengelolaan BMD.

- e. Komitmen Pimpinan mampu memoderasi variable kepatuhan regulasi terhadap kualitas pengelolaan BMD.
- f. Komitmen Pimpinan mampu memoderasi variable sistem Informasi Manajemen terhadap kualitas pengelolaan BMD.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga kemungkinan ada bias dari jawaban responden yang kurang cermat, menjawab asal-asalan dan menjawab setiap pertanyaan tidak terlepas dari persepsi masing-masing responden dan bersifat subjektif.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan di OPD Pemerintah Kabupaten Waropen, sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan untuk pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Indonesia.

### **Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan:
  - a. Komitmen dari pimpinan maupun dari segala pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD di Kabupaten Waropen.
  - b. Mengikutsertakan Pengurus Barang OPD dan pegawai di bidang aset untuk meningkatkan keahliannya dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD.
  - c. Segera menetapkan Keputusan Bupati terkait Pengurus Barang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - d. 40 Pengurus Barang OPD menyusun kartu inventaris ruangan pada masing-masing OPD.
2. Bagi Akademisi:
  - a. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel untuk menguji kualitas pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, misalnya komunikasi, motivasi, dan lainnya.
  - b. Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui penyebaran angket/kuesioner juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar, Iqlima., Darwanis dan Abdullah, Syukriy., 2013, “Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset”, *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, vol. 2, no. 1, Februari 2013.
- Burhanudin, (2009), *Manajemen Aset Daerah*, Edisi Pertama. Bogor, Pusdiklatwas. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Chabib Soleh, Heru Rochmansyah (2010), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Edisi Kedua, Juli 2010, Penerbit Fokus Media Bandung;
- Darmansyah, (2005) *Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, dalam *Otonomi Daerah; evaluasi & proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa-Partnership, Jakarta;
- Darno, 2012, “Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna (studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*, vol. 1, no.1. Daulay, Murni, 2010, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan, USU Press.
- Erizul, dan Yuliani, Febri., 2014, “Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah”. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, vol. 2, no. 2, Maret 2012.
- Fauduzzakiah, 2013, “Efisiensi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues)”, *Tesis Akuntansi Pascasarjana Universitas Gajah Mada*, <https://repository.ugm.ac.id>.
- Chair, Abdul. 2001. *Peranan Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kegunaan Aset Tanah dan Bangunan untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Pemda DKI Jakarta)*. Tesis S-2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta. *etd.repository.ugm.ac.id*
- Inayah. 2010. *Studi Persepsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah di Kota Tangerang*. Tesis. FISIP. Universitas Indonesia. Munaim. 2012. *Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Program PascaSarjana, Universitas Terbuka. UPNJJ Mataram. *lib.ui.ac.id*
- Nancy, 2015. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi*, *Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2.
- Oktaviana. 2010. *Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK di Kabupaten Toja Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. *etd.repository.ugm.ac.id*
- Pekei, Beni., Hadiwidjojo, Djumilah., dan Sumiati,Djumahir, 2014. *The Effectiveness Of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura*, *International Journal of Business and Management Invention*. [https://www.ijbmi.org/papers/Vol\(3\)](https://www.ijbmi.org/papers/Vol(3))
- Mubarak N. (2015), *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA Keuangan) Dalam Mendukung Kecepatan Laporan dan Pengawasan Keuangan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo* (Tesis). Makassar: Universitas Hasanuddin. *journal.unhas.ac.id*
- Simamora, Rudianto, dan Halim, Abdul., 2012. *Faktor –faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 10. Nomor 01.
- Siregar, Doli. D, 2004, *Management Aset Strategi Penataan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siregar, Syofian, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta, Kencana



